

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA GALANGPENGAMPON

Nelly Erfina Putri, Hendri Hermawan Adinugraha
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

nellyerfinaputri@mhs.uingusdur.ac.id , hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to determine the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) through community empowerment in reducing unemployment in Galangpengampon Village. This research is qualitative research using descriptive observation methods. The type of research conducted is field research using qualitative descriptive methods. This data was obtained from interviews. The results showed that BUMDes Galangpengampon plays a role in developing community potential. Its role specifically includes creating an environment or climate that allows the development of potential, but its implementation is still less than optimal because there are several inhibiting factors such as human and financial resources and the weak ability to socialize the BUMDes Program in the community. However, the community participation in the management of BUMDes Galangpengampon shows that BUMDes has a role in mobilizing the community. Therefore, BUMDes are seen as having the potential to overcome poverty and reduce unemployment, although the numbers are still relatively small.

Keywords: BUMDes, Community empowerment, Unemployment

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di Desa Galangpengampon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data ini diperoleh dari informan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Galangpengampon berperan dalam pengembangan potensi masyarakat. Perannya secara khusus antara lain menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi, namun pelaksanaannya masih kurang optimal karena terdapat beberapa faktor penghambat seperti sumber daya manusia dan keuangan serta lemahnya kemampuan sosialisasi Program BUMDes di masyarakat. Namun dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Galangpengampon menunjukkan bahwa BUMDes mempunyai peran dalam menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes dipandang mempunyai potensi untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, meskipun jumlahnya masih relatif kecil.

KATA KUNCI: BUMDes, Pemberdayaan masyarakat, Pengangguran

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kemandirian desa termasuk pembangunan daerah pedesaan. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah untuk membangun desa yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas keragaman usaha, menjamin ketersediaan sarana prasarana yang menunjang perekonomian pedesaan, memperkuat kelembagaan, memperkuat rantai produksi pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peluang pengembangan keterampilan daerah pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional (Ledger et al., 2022).

Proses pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat (Desa & Margayaningsih, n.d.). Pemberdayaan masyarakat yang berhasil tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan masyarakat yang melakukan pemberdayaan saja, namun mereka yang diberdayakan juga turut berpartisipasi aktif dalam mengubah dan memperbaiki kondisi agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. (Adenansi & Rusyidi, 2013).

Saat ini, masyarakat harus berorientasi pada pembangunan, yaitu dengan pembentukan lembaga berbasis ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui lembaga yang berorientasi bisnis (Ilmu et al., 2016). Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan, karena masih tingginya angka pengangguran menghambat pembangunan Indonesia. Pengangguran masih menjadi masalah serius saat ini karena berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Bermula dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bahkan berujung pada penurunan kekayaan, penguatan komunitas diharapkan dapat memperbaiki dan mengubah kondisi sosial. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi meningkatnya angka pengangguran. (Publik et al., n.d.).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemerintah saja. Namun juga bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dengan kehidupan yang lebih baik dengan cara yang sesuai. Pemberdayaan juga bertujuan untuk memperkuat masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat (Ilmu et al., 2016)

Untuk meningkatkan perekonomian desa, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menguatkan ekonomi berbasis desa melalui pembentukan lembaga BUMDes (Nasional et al., n.d.). "Pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa memiliki tujuan untuk melayani masyarakat pedesaan dalam mengembangkan bisnis yang produktif, dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa dan masyarakat" (Srirejeki, 2018). BUMDes merupakan wadah pergerakan ekonomi yang ada di desa dan berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan serta organisasi bisnis. BUMDes sebagai organisasi sosial yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai organisasi komersial, tujuannya adalah mencari keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal ke pasar. Bentuk

BUMDes di setiap desa di Indonesia berbeda-beda tergantung pada karakteristik lokal desa, potensi dan sumber daya masing-masing desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, organisasi BUMDES ini dapat menjadi kekuatan pendorong kesejahteraan dengan salah satu caranya, yaitu menciptakan produktivitas ekonomi di desa dengan menghargai potensi sumber daya desa. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan BUMDES diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun pendapatan desa itu sendiri (Rakhman, 2022).

Pembentukan BUMDES pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang ada sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu peran BUMDES adalah sebagai sumber kegiatan perekonomian di desa. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga berperan dalam BUMDES (Hastutik et al., 2021). BUMDES mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesejahteraan masyarakat melalui perannya dalam memberikan pelayanan sosial. Lahirnya BUMDES merupakan awal dari kemenangan desa, karena dengan adanya BUMDES maka desa dapat mempunyai kekuatan untuk menentukan langkah-langkah yang diinginkan dalam membangun kesejahteraan (Sopaheluwakan et al., n.d.).

Kegiatan BUMDes antara lain menerapkan konsep wirausaha sosial untuk mengembangkan potensi desa dan menghasilkan manfaat ekonomi, selain itu BUMDes juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, pemeliharaan motivasi kerja, wadah pemberdayaan, dan wadah penguatan solidaritas antar masyarakat desa. BUMDes juga berperan dalam menciptakan inovasi yang dapat mengurangi pengangguran. BUMDes membantu perangkat desa mengelola dana desa dan mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang ada di desa (Muryanti, 2020).

BUMDes dapat terjadi jika terdapat kesetaraan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, terpisah dari pengelolaan pemerintah desa. Sejumlah lembaga keuangan mikro masyarakat berminat bergabung dalam unit usaha BUMDes. Jenis usaha BUMDes dapat berupa unit usaha keuangan, unit pasar, dan unit jasa lainnya. Jika skala usaha seperti ini dikelola dengan baik, maka BUMDes akan mampu menjadi organisasi perekonomian masyarakat yang fleksibel dan dapat diandalkan. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang amanah dan berketahanan. Namun kenyataannya, banyak masyarakat desa yang tidak memiliki BUMDes (Ikhwansyah et al., 2020).

Tercapainya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran di desa Galangpengampon. BUMDes hendaknya menerapkan tata kelola yang baik dan berupaya menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam meningkatkan operasional usaha, sehingga modal yang dialokasikan BUMDes berupa pemberdayaan, program menengah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. karena Pemerintah harus memperhatikan berbagai fasilitas pendukung pengelolaan BUMDes demi kelancaran program yang dilaksanakan (Anjar & Laksono, 2022). Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pengelola BUMDes dalam melakukan berbagai macam program pemberdayaan, maka BUMDes dapat berperan optimal dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha rakyat (Lestari et al., 2011)

2. TINJAUAN TEORITIS

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dikuasai oleh desa dengan menempatkan langsung pada potensi yang telah dibebaskan dan dimanfaatkan oleh desa. Desa dipisahkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, pengelolaan aset dan kegiatan usaha lainnya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang dibangun dan dimiliki oleh desa yang berperan untuk membantu dan menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperluas pengetahuan masyarakat desa dan berfungsi sebagai 'pekerjaan' bisnis atau pemasaran (Kamarosied, 2019).

Pendirian dan pengelolaan badan usaha desa merupakan bagian dari pengelolaan ekonomi desa yang efektif dan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembebasan, keterbukaan, fleksibilitas, kerjasama, keberlanjutan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat beroperasi secara mandiri, proaktif, profesional, efektif dan efisien. Distribusi barang dan jasa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan perangkat desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat. BUMDes juga harus mampu memberikan pelayanan kepada pihak ketiga atau non anggota dengan tetap menjaga pelayanan dan harga yang ditetapkan sesuai standar peraturan pasar.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana masyarakat secara proaktif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri dilibatkan. Oleh karena itu, kata kunci pemberdayaan masyarakat meliputi: proses pembangunan, masyarakat proaktif, pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melaksanakan pemberdayaan tetapi juga oleh pihak yang diberi kewenangan untuk mengubah status quo dan kondisi menjadi lebih baik, sesuai dengan standar pengelolaan pasar (Maryani, 2019).

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat dimanfaatkan dan diberdayakan, karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga harus membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat dibangun dan memberikan inspirasi untuk memberdayakan masyarakat.

2. Pengangguran

Definisi pengangguran yang luas mengacu pada orang-orang yang menganggur atau kehilangan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pengangguran mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menganggur namun sedang mencari

pekerjaan atau bersiap memulai usaha, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena ditawarkan pekerjaan. . bekerja. tapi aku belum mulai bekerja. (Marini & Putri, 2020).

Pengangguran seringkali menjadi masalah perekonomian karena menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di perdesaan pada Agustus 2022 mencapai 5,04%, sedangkan di perkotaan sebesar 6,69%. Meskipun tingkat pengangguran di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan, namun bukan berarti masalah pengangguran di perdesaan bisa diabaikan begitu saja. Cara mengatasi pengangguran di pedesaan dengan cara meningkatkan kesempatan kerja di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru atau membuat program pemberdayaan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif observatif. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk memberikan deskripsi sistematis dan faktual tentang masalah yang sedang diselidiki. Pendekatan observatif adalah metode mengamati subjek penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hasil penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data di lapangan (Septiani et al., 2020).

Lokasi penelitian berada di Desa Galangpengampon. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Adlini et al., 2022). Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Galangpengampon. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti laporan, catatan, buku pedoman atau perpustakaan. Data sekunder penelitian ini yaitu data dari dokumen terkait peran Badan Usaha Desa (BUMDES) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran di Desa Galangpengampon.

Data diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara. Selanjutnya, diuji kredibilitas (kepercayaan) dan keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi(mengecek kebenaran dari berbagai sudut panjang) dan menggunakan bahan referensi (Sa'adah et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan perencanaan pemerintah desa dalam perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Galangpengampon.

Melalui musyawarah desa, perangkat desa ikut serta dalam pengembangan pengelolaan BUMDes dengan persetujuan Dewan Pertimbangan Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM). Hal ini terlihat dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan desa khususnya RPJM Desa dan RKP Desa. BUMDes mendapat perhatian khusus ketika menyetujui sejumlah program kegiatannya pada RPJM Desa dan setiap tahunnya menjadi usulan prioritas pada RKP Desa. dianggarkan di APB Desa (Faoziah, 2023).

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional adalah menstabilkan, berinovasi, memodernisasi, memelopori dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Upaya dalam mengatasi pengangguran merupakan bagian dari kebijakan pembangunan. Kebijakan untuk mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja. Pengangguran jelas menjadi agenda Misi Pembangunan Desa, khususnya berperan dalam mendorong program pembangunan dengan memberdayakan masyarakat agar berhasil mendukung kesejahteraan masyarakat.

1. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Galangpengampon dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran

BUMDes tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya: “pembangunan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, transfer teknologi, dan kemandirian,”. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mendirikan BUMDes dan menempatkan mereka pada kepengurusannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola BUMDes. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan BUMDes yang ada. Masyarakat desa sekarang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan memulai usaha baru dan menghasilkan lebih banyak uang sebagai hasil dari proses pembelajaran.

Banyaknya anak muda di Desa Galangpengampon yang tidak mempunyai pekerjaan karena faktor pendidikan mereka yang hanya sampai di bangku SD saja, membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan di masa sekarang ini, dimana minimal tingkat pendidikan harus sampai di bangku SMA, melihat kondisi seperti ini pemerintah Desa Galangpengampon memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran, melalui BUMDes Pemerintah Desa mengajak anak muda untuk saling berkontribusi dalam BUMDes dengan menggali potensi Desa, menurut Kepala Desa Bapak Wildan mengatakan “Saya mengajak masyarakat bisa mendukung BUMDes yang kita bangun semata-mata untuk kemajuan desa kita seperti meningkatkan pembangunan. Dengan mengoptimalkan peranan BUMDes, perekonomian desa kita bisa terus maju,”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BUMDes Galangpengampon telah melakukan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat. Perannya termasuk menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi berkembang, seperti membuka GOR Lapangan Futsal untuk disewakan dimana GOR tersebut dibuat dari dana APBD Desa dan termasuk salah satu program BUMDes yang ada di Desa Galangpengampon. Di dalam GOR tersebut dibuatkan ruko ruko kecil yang digunakan untuk berjualan produk UMKM Desa sehingga dengan cara tersebut dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Desa. Adanya masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Galangpengampon menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran untuk mendorong masyarakat. Akibatnya ,

BUMDes dianggap mampu mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, meskipun jumlahnya masih relatif kecil .

2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Galangpengampon

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kemampuan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pelatihan BUMDes didasarkan pada inisiatif masyarakat desa. BUMDes dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dan berdasarkan kebutuhan serta potensi desa, artinya proyek-proyek yang dilaksanakan ke depan akan lahir dari keinginan masyarakat dan keinginan yang membawa kemajuan bagi masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes Galangpengampon berjalan namun belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, selain itu pelaksanaan program BUMDes juga belum lancar. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan keuangan serta lemahnya sosialisasi program BUMDes kepada masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia belum optimal karena masih adanya permasalahan internal yang belum terselesaikan. Permasalahan internalnya adalah pengelolaan kehilangan legalitasnya di masyarakat karena belum dilaksanakannya keputusan pengelolaan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes seperti pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, struktur permodalan, dan beberapa pelaku BUMDes memiliki kualitas kerja yang buruk. Artinya pengelolaan BUMDes di Desa Galangpengampon belum dapat berkembang dengan baik dan perekonomian masih tergolong lemah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Galangpengampon.

Peran BUMDes dalam mengurangi pengangguran di pedesaan tentunya mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program tersebut.

Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah

Penanganan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMDes untuk membangun bisnis dan perekonomian masyarakat desa yang luas, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perekonomian Desa yang kuat dan berorientasi. Pemberian dana untuk upaya pengembangan BUMDes menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes. Peran BUMDes sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan desa.

2. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam

Desa mempunyai kebebasan dalam mengelola wilayah, perekonomian, dan masyarakatnya. Desa kini berhak mengelola wilayahnya sendiri dan desa tersebut juga bisa mengembangkan perekonomiannya sendiri. Pembangunan ekonomi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan aset desa sebagai potensi desa.

Desa mempunyai aset awal yang dapat berupa tanah, danau, sungai, atau sumber daya alam lainnya. Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk Pembangunan, Pelatihan, Penatausahaan, Pengurusan Desa tertinggal.

Faktor penghambat

1. Faktor Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program tidak lepas dari anggaran yang dimilikinya. Sebagai suatu organisasi bisnis, keberadaan modal usaha sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Keterbatasan persiapan di bidang keuangan perusahaan berarti akan adanya keterbatasan pada tingkat kompetensi pemimpin bisnis. Desa mempunyai anggaran untuk menjalankan usaha BUMDes, namun masih sangat terbatas untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, para pengelola BUMDes memerlukan terobosan dalam memilih usaha yang tepat sesuai anggarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam pengelolaan usaha rakyat masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena besarnya dana. tersedia. Unit-unit usaha BUMDes dan kelompok masyarakat yang berada di sampingnya memungkinkan adanya partisipasi masyarakat yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes. Namun pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satunya yaitu potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena keterbatasan modal.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Pengelolaan otonomi desa menjadi peluang bagi desa untuk mengembangkan desanya sesuai potensi yang dimilikinya. BUMDes menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat terbuka namun kendala yang ada di masyarakat masih relatif rendah dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kursus pelatihan untuk mendukung program BUMDes yang dikelola.

BUMDes dinilai tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena minimnya tata kelola dan sumber daya manusia yang tidak berkelanjutan sehingga dibutuhkan koordinasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk memajukan keberadaan BUMDes di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan di atas, BUMDes Galangpengampon berperan dalam pengembangan potensi masyarakat. Perannya secara khusus antara lain menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi, namun pelaksanaannya masih kurang optimal karena terdapat beberapa faktor penghambat seperti sumber daya manusia dan keuangan serta lemahnya kemampuan sosialisasi Program BUMDes di masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia belum optimal karena masih

adanya permasalahan internal yang belum terselesaikan. Permasalahan internalnya adalah pengelolaan kehilangan legalitasnya di masyarakat karena belum dilaksanakannya keputusan pengelolaan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes seperti pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, struktur permodalan, dan beberapa pelaku BUMDes memiliki kualitas kerja yang buruk. Namun dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Galangpengampon menunjukkan bahwa BUMDes mempunyai peran dalam menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes dipandang mempunyai potensi untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, meskipun jumlahnya masih relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenansi, D., & Rusyidi, B. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan*. 347–353.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anjar, F., & Laksono, T. (2022). *BUM desa sebagai kekuatan ekonomi baru : sebuah gagasan untuk desa di Indonesia*. February.
- Desa, M. D. I., & Margayaningsih, D. W. I. I. (n.d.). *Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan*. 72–88.
- Faoziah, S. (2023).. [http://repository.syekhnurjati.ac.id/10267/1/Optimalisasi Dana Desa Untuk Menanggulangi Kemiskinan 02-05-2023.pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/10267/1/Optimalisasi%20Dana%20Desa%20Untuk%20Menanggulangi%20Kemiskinan%2002-05-2023.pdf)
- Hastutik, D., Padmaningrum, D., Wibowo, A., Studi, P., Pertanian, K., Pertanian, F., & Maret, U. S. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang*. 5903(1), 46–58.
- Ikhwansyah, I., Afriana, A., & Faisal, P. (2020). *An Empowerment of a Village Economy : (BUMDES) in Indonesia*. 12(8), 192–207.
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Farid, M., & Ap, M. (2016). (*Studi Bumdes Mawar Desa Kepel , Kecamatan Ngetos , Kabupaten Nganjuk*) Syndi Dwi Purnamasari. 1–12.
- Kamarosied, H. (2019). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES (Pertama)*. Mitra Wacana Media.
- Ledger, G., Studi, J., Akuntansi, I., & Volume, K. (2022). *General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Volume 01 No. 01*. April 2022. 01(01), 13–26.

- Lestari, O. A., Musa, P., & Rahmaniah, S. E. (2011). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu*. 9182.
- Marini, L., & Putri, N. T. (2020). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar? *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 70–83.
- Maryani, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. In R. R. Nainggolan (Ed.), *Jurnal Ilmiah CIVIS* (1st ed., Vol. 1, Issue 2). Deepublish.
- Muryanti, M. (2020). *Towards Social Entrepreneurship in the Village through Village-Owned Enterprises*. June. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161>
- Nasional, D. P., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (n.d.). *Badan Usaha Milik Desa*.
- Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (N.D.). *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi*. I(4), 9–14.
- Rakhman, A. T. (2022). *Planning for the management of village- owned enterprises (BUMDes) : Perencanaan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*. 18, 1–5.
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 61–62.
- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana, D. (2020). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Persada*, III(3), 130–137.
- Sopaheluwakan, E., Kakisina, L., & Kaplale, R. (n.d.). *Role Of Village Owned Enterprises (Bumdes) In Community Empowerment Country House Of Three District Ambon Bay*. 02(01), 110–125.
- Srirejeki, K. (2018). *Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development : case of Indonesia*. 20(1), 5–10.